



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2023

RENCANA KERJA INSPEKTORAT
TAHUN 2024

Sarilamak, Desember 2023



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang Telah Memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga telah disusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat serta pedoman untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat tahun 2024

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 memuat tujuan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, yang dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 sehingga bisa mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah, semoga dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Sarilamak, Desember 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos, MM, CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660913 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang I-1
	1.2 Landasan Hukum I-9
	1.3 Maksud dan Tujuan I-10
	1.4 Sistematika Penulisan I-11
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota II-26
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat II-29
	2.4 Review terhadap Rancangan RKPD II-30
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-50
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota III-1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota III-5
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan III-14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
BAB V	PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Tabel 3.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah
Tabel 3.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lingkup Urusan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 yang Tercantum dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026

NOMOR : 33

TANGGAL : DESEMBER TAHUN 2023

HAL : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan institusi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif dan Berkelanjutan”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu ditetapkan rencana kerja yang mendukung terwujudnya visi tersebut. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diharapkan seluruh kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

Pengertian ringkas Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yaitu : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang mana merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, proses penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah dengan tahapan sebagai berikut :

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja PD.

I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 905/333/BUP-LK/XII/2022 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Rencana Kerja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/BAPELITBANG-LK/II/2023 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun jadwal disusun sebagai mana disajikan pada Tabel 1.1 di halaman berikut.
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2022 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bapelitbang mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
A	Persiapan Penyusunan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																
3	Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah																																
4	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																																
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2024																																
2	Penyempurnaan Ranwal Renja Berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik																																
3	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil Musrenbang RKPD																																
2	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C	Penyusunan Rancangan Renja 2024																																
1	Penyusunan Rancangan Renja PD																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja PD oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja PD sudah selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi																																
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																
1	Pelaksanaan Forum PD Inspektorat yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja Inspektorat																																
E	Perumusan Rencana Kerja 2024																																
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rencana Kerja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD																																
F	Penetapan Renja PD 2024																																
1	Penyampaian Rencana Kerja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																
2	Penyempurnaan Rencana Kerja setelah diverifikasi																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2022				2023				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		Des				Jan				1				2				3				4				1				2			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Penyampaian kembali Rencana Kerja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																
4	Penyampaian Rencana Kerja semua PD oleh Bapelitbang kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																																
5	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Bapelitbang																																

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Inspektorat tahun 2021-2026. Rencana Kerja akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan Rencana Kerja.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Rancangan Awal Rencana Kerja yang telah disempurnakan akan menjadi Rancangan Renja dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disempurnakan berdasarkan masukan dan berita acara forum tersebut. Rancangan Renja yang telah disempurnakan akan diverifikasi oleh Bapelitbang untuk melihat kesesuaian dan keselarasan antara Rancangan Renja dengan Rancangan Akhir RKPD dan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan ini menjadi Rancangan RKPD.

Dalam pembahasan Rancangan RKPD harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang secara tidak langsung juga akan selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Forum Perangkat Daerah Inspektorat dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023 di Aula Inspektorat yang dihadiri oleh 42 Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan Akhir RKPD akan dibahas bersama dengan seluruh kepala perangkat daerah guna memastikan bahwa program dan kegiatan PD telah terakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

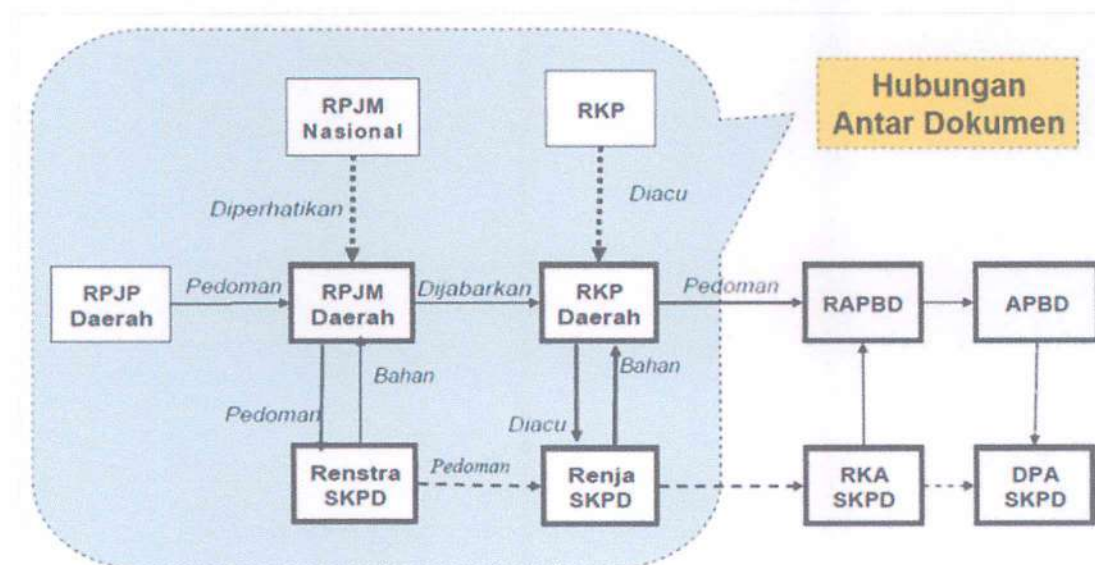
Perumusan terhadap Rencana Kerja dilakukan berdasarkan Perkada RKPD yang telah ditetapkan. Setelah Rencana Kerja disempurnakan dan diverifikasi oleh Bapelitbang maka Renja tersebut ditetapkan dengan Perkada.

VI. Penetapan Renja PD

Renja Inspektorat mempedomani Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Selanjutnya Renja Inspektorat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Inspektorat juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan renja provinsi serta K/L.

Bagan hubungan antar dokumen perencanaan Daerah:



1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan atas PERDA No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
 18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhirkan Klarifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Inspektorat secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi (tusi) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Inspektorat.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Inspektorat ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tusi sekretariat dan bidang-bidang di Inspektorat.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan Tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Inspektorat, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dan sebagainya.

III. Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2022 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2022 dan realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada Bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 disajikan Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Tahun 2022

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6 1	INSPEKTORAT DAERAH									
6 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
6 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
6 1 1 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja Inspektorat	18 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LKJIP, LKPI, LPPD, SPIP dan SAKIP	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PMPRB Inspektorat	24 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	50,00%
6 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
6 1 1 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	288 Orang	48 Orang	48 Orang	48 Orang	100%	48 Orang	144 Orang	50,00%
6 1 1 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPj yang Diverifikasi	6000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%	1000 Dokumen	3000 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Penatausahaan Keuangan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	108 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	52 Laporan	50,00%
6 1 1 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 Dokumen	50,00%
6 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 1 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	636 Stel	106 Stel	106 Stel	106 Stel	100%	106 Stel	318 Stel	50,00%
6 1 1 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan, Ujian Fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-
6 1 1 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	1.200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	600 Orang	50,00%
6 1 1 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah APIP yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pemantapan	-	-	-	-	-	-	-	-
6 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Listrik yang Diadakan	60 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	30 paket	50,00%
6 1 1 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan	18 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	50,00%
6 1 1 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Alat perlengkapan kantor dan bahan kegiatan kantor lainnya	150 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100%	25 Jenis	25 Jenis	50,00%
6 1 1 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	30 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	15 paket	50,00%
6 1 1 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan	48 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	24 Jenis	50,00%
		Jumlah Lembar Penggandaan	504.060 Lembar	84.010 Lembar	84.010 Lembar	84.010 Lembar	100%	84.010 Lembar	25.2030 Lembar	50,00%
6 1 1 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Buku Peraturan Perundang-Undangan	120 eksemplar	20 eksemplar	20 eksemplar	20 eksemplar	100%	20 eksemplar	60 eksemplar	50,00%
6 1 1 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi Penyediaan Makanan	1.200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	200 orang	600 orang	50,00%
		Jumlah porsi Penyediaan Minuman					-	-		50,00%
6 1 1 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	600 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100%	100 laporan	300 laporan	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
		Jumlah Porsi Makan Minum Rapat					100%	-		50,00%
6 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 1 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diadakan	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	16,67%
		Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan					-	-		
6 1 1 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	
6 1 1 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Aula Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	
6 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 1 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat dan Dokumen	5.400 Lembar	900 Lembar	900 Lembar	900 Lembar	100%	900 Lembar	2700 Lembar	50,00%
		Jumlah pengiriman surat/dokumen					100%	-		50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet	9.000 meter kubik	1.500 meter kubik	1.500 meter kubik	1.500 meter kubik	100%	1.500 meter kubik	4.500 meter kubik	50,00%
			21.600 KWH	3.600 KWH	3.600 KWH	3.600 KWH	100%	3.600 KWH	10.800 KWH	50,00%
			72 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	50,00%
			72 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100%	12 rekening	36 rekening	50,00%
6 1 1 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Honor Pengurus Barang, PTT dan Non PNS Lainnya	36 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	18 orang	50,00%
6 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 1 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	270 Unit	45 Unit	45 Unit	45 Unit	100%	45 Unit	135 Unit	50,00%
			30 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	15 unit	50,00%
			300 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	150 unit	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 1 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Kantor yang Dipelihara	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	50,00%
6 1 1 2.09 0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpelihara	18 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	50,00%
6 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irban I,II,III,IV	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 2 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 2 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil audit kinerja	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	50,00%
6 1 2 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP yang diterbitkan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	34 Laporan	50,00%
6 1 2 2.01 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	150 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	75 Laporan	50,00%
6 1 2 2.01 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	150 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	75 Laporan	50,00%
6 1 2 2.01 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa yang Diterbitkan	270 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	100%	45 Laporan	135 Laporan	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 2 2.01 0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 2 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 2 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 2 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Dilaksanakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50,00%
6 1 2 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Diterbitkan	90 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	45 Laporan	50,00%
6 1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level maturitas SPIP	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 3 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50%
6 1 3 2.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 3 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 3 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	50% I
6 1 3 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 3 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan Pendampingan yang Dilaksanakan	12 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	6 Kegiatan	50,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan 2023	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasin Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
6 1 3 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%
6 1 3 2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Penegakan Integritas yang Dilaksanakan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 3 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Perencanaan Inspektorat yaitu Dokumen Renstra, Renja Inspektorat dan Perubahan Renja Inspektorat.
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Inspektorat.
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Inspektorat.

- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun 2022.
- e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat Tahun 2022.
- f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 5 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2022.
- g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 4 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 4 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Evaluasi Kinerja Inspektorat Tahun 2022.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji

dan Tunjangan ASN dengan target 48 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 48 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah dibayarkannya Gaji ASN Inspektorat Tahun 2022.

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 1000 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1000 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Inspektorat Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Inspektorat Tahun 2022.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Tahun 2022.
- e) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Pemeriksaan dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2022.

- f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dengan target 18 Laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 18 Laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Inspektorat Tahun 2022.
- g) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target 1 dokumen. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 dokumen dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2022.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dengan target 106 stel. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 120 stel dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan untuk pegawai Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target 48 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 48 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang terlaksana bagi pegawai Inspektorat Tahun 2022.

- c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 200 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 200 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dengan lancar dan sukses.
- d) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 48 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 48 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dengan lancar dan sukses.
- e) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 48 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 48 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dengan lancar dan sukses.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan target 10 Paket. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 10 paket dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 3 paket. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 3 paket dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan target 25 jenis. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 25 jenis dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Inspektorat Tahun 2022.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 5 paket. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 5 paket dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Bahan Logistik Kantor Inspektorat Tahun 2022.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan

target 8 jenis dan 84010 lembar. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 8 jenis dan 84010 lembar dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan di Inspektorat Tahun 2022.

- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan dengan target 20 eksemplar. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 20 eksemplar dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan di Inspektorat Tahun 2022.
- g) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target 200 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 200 orang dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Tamu Inspektorat Tahun 2022.
- h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 100 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 100 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Inspektorat Tahun 2022.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dengan target 6 unit. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 0 unit dengan tingkat capaian realisasi sebesar 00,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Inspektorat Tahun 2022.

- b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target 6 jenis. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 0 jenis dengan tingkat capaian realisasi sebesar 00,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Mebel di Inspektorat Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Gedung Aula Inspektorat dengan target 1 unit. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 0 unit dengan tingkat capaian realisasi sebesar 00,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Aula di Inspektorat Tahun 2022.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 900 lembar. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 900 lembar, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 12 paket, 12 rekening, 1500 meter kubik, dan 3600 KWH. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 12 paket, 12 rekening, 1500 meter kubik, dan 3600 KWH, dengan tingkat capaian realisasi sebesar

100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Inspektorat Tahun 2022.

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 6 orang. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 6 orang, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Inspektorat Tahun 2022.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 50 unit, 45 unit, dan 5 unit. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 50 unit, 45 unit, dan 5 unit, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 unit, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Inspektorat Tahun 2022.

- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya di Inspektorat Tahun 2022.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan target 152 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 152 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target 12 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 12 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja dengan target 25 laporan. Realisasi sampai dengan bulan

Desember 2022 adalah 25 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Reviu Laporan Kinerja OPD di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

- d) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan dengan target 25 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 25 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Reviu Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- e) Sub Kegiatan Pengawasan Desa. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa dengan target 45 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 45 laporan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- f) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Kerjasama Pengawasan Internal Tahun 2022.
- g) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dengan target 80% dan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dengan target 80%. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 80% dan 80%, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah

terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2022.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
 - a) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah dengan target 1 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
 - b) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit dengan target 15 laporan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 15 laporan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - a) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan sosialisasi SPIP dengan target 1 Kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 Kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi dan pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

- b) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

- a) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- b) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan target 2 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 2 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Indikator

Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

- d) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan target 1 kegiatan. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2022 adalah 1 kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas di lingkungan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun IKK Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal tersebut akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan kepastian prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator Kinerja Utama (2021)	SPM/ Standar Nasional	IKU KD	IKD	IKU PD INSPEKTORAT	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)			(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)				√	81	82	83	84	85	18,60	39,53	83	84	85	-
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Di kab. Lima puluh kota (%)															
	a. Eksternal			√		81,50	82,00	82,50	83,00	83,5	80,43	82,09	82,50	83,00	83,5	
	b. Internal			√		83,00	83,50	84,00	84,50	85	82,66	76,43	84,00	84,50	85	
3	Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)				√	80	83	85	87	90	100	100	85	87	90	
4	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)		√		√	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	
5	Persentase OPD dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)				√	50	55	60	65	70	42	44	60	65	70	
6	Level Kapabilitas APIP(level)				√	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

NO	Indikator Kinerja Utama (2021)	SPM/ Standar Nasional	IKU KD	IKD	IKU PD INSPEKTORAT	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)			(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)				√	75	77	79	80	81	61,14	61,04	79	80	81	
8	Nilai IRB Inspektorat (nilai)				√	30	31	32	33	34			32	33	34	
9	Nilai IKM Inspektorat (nilai)		√			85,98	87,98	89,97	91,97	93,96			89,97	91,97	93,96	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dirumuskan sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi;
2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu;
3. Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan daerah;
4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat;
6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi;
7. Peningkatan maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
8. Peningkatan Kapabilitas APIP

9. Mendorong tercapainya opini WTP atas pemeriksaan BPK RI;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan fungsi sebagai OPD Penunjang dalam bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah APIP di Inspektorat
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Inspektorat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, Instansi/Dinas

Dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan audit, evaluasi, reviu dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) dapat berjalan dengan baik.
2. Pengoptimalan Klinik Pengawasan sehingga semua OPD dan juga semua Nagari dapat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI dapat diselesaikan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Inspektorat dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami

penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Inspektorat disajikan dalam Tabel 2.3 berikut

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD :Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
	INSPEKTORAT DAERAH				17.613.354.150	INSPEKTORAT DAERAH				9.831.563.649	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.793.290.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	60,47%	7.736.574.249	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	241.500.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	21,93%	62.297.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	57.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	21.500.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 dokumen	6.700.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	28.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.600.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 dokumen	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	23.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumlah dokumen yang disusun (LkjIP, SPIP, LKPJ, SPBE)	5 dokumen	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	Jumla Laporan yang disusun (LkjIP, SPIP, LKP J, SPBE)	4 Laporan	6.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	28.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	7.497.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib Administrasi Keuangan	95%	7.308.940.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib Administrasi Keuangan	77,39%	5.953.900.549	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	7.038.690.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	5.931.400.549	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	63.250.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	6.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	1 dokumen	51.750.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	-	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	46.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	34.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.500.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disiapkan	18 laporan	34.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disiapkan	18 laporan	5.000.000	
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	2 laporan	40.250.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	-	-	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	2.585.350.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	33,08%	900.378.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											target
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Inspektorat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	25.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Inspektorat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 stel	102.637.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 paket	34.900.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	5.000.000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 kali	1.310.697.205	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	615.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 orang	422.625.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57 orang	160.478.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	704.390.295	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	85.000.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat daerah	95%	1.253.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat daerah	21,22%	279.944.700	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	48 buah	86.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 paket	15.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 unit	143.750.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 paket	24.950.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	30 buah	74.750.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 paket	14.997.800	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	92.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 paket	28.001.400	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5.000 lembar	74.750.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	25.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 bulan	40.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	5 dokumen	1.996.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								disediakan			
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200 porsi	143.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali	598.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	149.999.500	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%	602.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	345.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
2	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	207.000.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Gedung Aula Inspektorat	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	310.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	87,75%	272.460.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800 lembar	11.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Laporan	5.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 paket 12 rekening 1500 meter kubik 3600 KWH	92.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	77.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	207.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	190.260.000	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	491.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	54,44%	267.594.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 unit 45 unit 5 unit	316.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	203.530.000	
2	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Paket	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	14.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 paket	92.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	24.934.000	
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gednug Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 kegiatan	63.250.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gednug Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	25.130.000	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV	84%	3.762.064.150	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Inspektorat	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV	40,06%	1.794.169.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Persentase terlaksananya pengawasan internal	80%	2.955.064.150	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Persentase terlaksananya pengawasan internal	39,77%	1.469.169.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											target
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 laporan	575.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 laporan	250.000.000	
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 laporan	575.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	14 laporan	275.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
3	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	115 laporan	614.814.150	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	53 laporan	350.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
4	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	40.250.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa	20 laporan	460.000.000	Pengawasan Desa	Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Desa	18 laporan	250.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 kegiatan	172.500.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kesepakatan	85.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal	4 kegiatan	517.500.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah dokumen Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal	2 dokumen	214.169.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	807.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	38,26%	325.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah	4 kegiatan	207.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah	1 Laporan	75.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit	40 laporan	600.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit	18 laporan	250.000.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	Kapabilitas APIP	level 3	1.058.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	Kapabilitas APIP	level 3	300.820.400	
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis	95%	287.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan	33,32%	100.827.000	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengawasan		di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan			Fasilitasi Pengawasan		kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan			perlu penyesuaian target
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah peserta sosialisasi SPIP	43 OPD	149.500.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	55.827.000	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah dokumen peningkatan Kapabilitas APIP	1 dokumen	138.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	45.000.000	
II	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	95%	770.500.000	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	24,66%	199.993.400	Ada rasionalisasi pagu dana sehingga perlu penyesuaian target

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 kegiatan	143.750.000	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	15 perangkat Daerah	50.000.000	
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2 kegiatan	264.500.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19 perangkat Daerah	50.000.000	
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kegiatan	155.250.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kegiatan	49.992.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 kegiatan	207.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat Daerah	50.001.400	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk satuan kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melalui Musrenbang, namun dilakukan dengan proses adanya usulan dari berbagai pihak terutama dari kelompok masyarakat ,dan LSM serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari satuan kerja. Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik ditingkat Provinsi Sumatera Barat, maupun ditingkat Nasional, serta pada kegiatan langsung pada pelayanan pemerintahan di kecamatan dan nagari. Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Inspektorat sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih meningkatkan program kegiatan terutama sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meningkatkan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja Inspektorat menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Prioritas Daerah, Lokasi, Pagu Indikatif dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2024

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.33.0000 INSPEKTORAT

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
					INSPEKTORAT							9.831.563.649,00					20.251.257.273,00	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							9.831.563.649,00					20.251.257.273,00	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							9.831.563.649,00					20.251.257.273,00	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7.736.574.249,00					14.708.183.500,00	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							62.297.000,00					277.725.000,00	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	2 Dokumen	21,93 %	21.500.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	66.125.000,00
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	1 Dokumen	21,93 %	6.700.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	39.675.000,00
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target			
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	1 Dokumen	21,93 %	6.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	33.062.500,00
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	1 Dokumen	21,93 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Ookumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	39.675.000,00
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	1 Dokumen	21,93 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	26.450.000,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhtlsr Realisasi Kinerja SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Uma Pulu h Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	4 Laporan	21,93 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	39.675.000,00
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	- Kab. Uma Pulu h Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	1 Laporan	21,93 %	7.497.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	33.062.500,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.953.900.549,00					8.405.431.000,00
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Uma Pulu h Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	60 Orang/bulan	77,39 %	5.931.400.549,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.094.493.500,00
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Uma Pulu h Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	100 Dokumen	77,39 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	72.737.500,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	0 Dokumen	77,39 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	59.512.500,00	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	1 Laporan	77,39 %	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	52.900.000,00	
6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	1 Dokumen	77,39 %	5.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	39.750.000,00	
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	18 Laporan	77,39 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semester an SKPD	18 Laporan	39.750.000,00
6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase tertib administrasi keuangan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	0 Dokumen	77,39 %	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	46.287.500,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah									900.378.000,00				2.944.402.500,00
6	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase tertib administrasi kepegawalan perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	0	33,08 %	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase tertib administrasi kepegawalan perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	65 Paket	33,08 %	34.900.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	118.033.125,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target			
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	3 Dokumen	33,08 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	3 Dokumen	23.000.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	60 Orang	33,08 %	615.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	1.507.301.786,00	
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	57 Orang	33,08 %	160.478.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	486.018.750,00	
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	60 Orang	33,08 %	85.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	810.048.839,00	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									279.944.700,00				1.441.525.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	10 Paket	21,22 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	99.187.500,00	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	30 Paket	21,22 %	24.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	165.312.500,00	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	25 Paket	21,22 %	14.997.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	85.962.500,00	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	35 Paket	21,22 %	28.001.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	105.800.000,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	12 Paket	21,22 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	85.962.500,00
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	5 Dokumen	21,22 %	1.996.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	46.287.500,00
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	12 Laporan	21,22 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	165.312.500,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	12 Laporan	21,22 %	149.999.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	687.700.000,00	
6	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00					709.800.000,00
6	01	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	0 Unit	0%	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	396.750.000,00	
6	01	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel													
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	0 Unit	0%	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	238.050.000,00	
6	01	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	0 Unit	0%	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	75.000.000,00
6	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					272.460.000,00						357.075.000,00	
6	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	900 Laporan	87,75 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Laporan	13.225.000,00
6	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	12 Laporan	87,75 %	77.200.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.800.000,00
6	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target			
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	12 Laporan	87,75 %	190.260.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	238.050.000,00	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							267.594.000,00				572.225.000,00		
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	26 Unit	54,44 %	203.530.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	363.687.500,00	
6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
					Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	10 Unit	54,44 %	14.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000,00	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	1 Unit	54,44 %	24.934.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105.800.000,00
6	01	01	2.09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,47 %	1 Unit	54,44 %	25.130.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.737.500,00
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							1.794.169.000,00					4.326.373.773,00
6	01	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal							1.469.169.000,00					3.398.323.773,00
6	01	02	2.01	0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah												
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,06 %	10 Laporan	39,77 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	54 Laporan	661.250.000,00
6	01	02	2.01	0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbab I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,06 %	14 Laporan	39,77 %	275.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	661.250.000,00	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbab I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,06 %	53 Laporan	39,77 %	350.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 Laporan	707.036.273,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbab I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,06 %	1 Laporan	39,77 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan	46.287.500,00	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbab I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,06 %	18 Laporan	39,77 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	45 Laporan	529.000.000,00	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target			
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbab I,II,III,IV	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,06 %	1 Kesepakatan	39,77 %	85.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	198.375.000,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbab I,II,III,IV	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase terlaksananya Pengawasan Internal	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,06 %	2 Dokumen	39,77 %	214.169.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	595.125.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								325.000.000,00					928.050.000,00
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
						Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbab I,II,III,IV	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	- Kab. Ulu Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,06 %	1 Laporan	38,26 %	75.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	238.050.000,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
									Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolak Ukur		Target			
					Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB di wilayah Irbab I,II,III,IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,06 %	18 Laporan	38,26 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	690.000.000,00	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							300.820.400,00					1.216.700.000,00	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							100.827.000,00					330.625.000,00	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													
					Level maturitas SPIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	1 Rekomendasi	33,32 %	55.827.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	171.925.000,00	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
					Level maturitas SPIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Persentase terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	1 Rekomendasi	33,32 %	45.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	158.700.000,00	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							199.993.400,00					886.075.000,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													

Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Level maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	15 perangkat daerah	24,66 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	165.312.500,00	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
						Level maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	19 perangkat daerah	24,66 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	304.175.000,00	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
						Level maturitas SPIP	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	1 Kegiatan	24,66 %	49.992.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	178.537.500,00	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Level maturitas SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Level 3	3 perangkat daerah	24,66 %	50.001.400,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 perangkat daerah	238.050.000,00
TOTAL													9.831.563.649,00			20.251.257.273,00		

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Bidang Urusan	2024			2025			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	6	7.736.574.249	1	6	14.708.183.500	
2	Penyelenggaraan Pengawasan	1	2	1.794.169.000	1	2	4.326.373.773	
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1	2	300.820.400	1	2	1.216.700.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang disesuaikan juga dengan pagu anggaran yang diterima Inspektorat.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/ audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang diterima akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

INSPEKTUR
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660913 198603 1 009